



P E N E T A P A N

Nomor 341/Pdt.P/2024/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh;

Masnun bin Ramid, umur 58 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kp. Cikuray Rt.04 Rw. 01 Desa Rancasanggal, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut “Pemohon I”;

Karmah binti Karim, umur 60 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kp. Cikuray Rt.04 Rw. 01 Desa Rancasanggal, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut “Pemohon II”;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor 341/Pdt.P/2024/PA.Srg pada tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 20 Juni 1985, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Karim bin, berwakil kepada penghulu

Hal. 1 dari 6, Penetapan No. 341/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama Ustad Arwini, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Maslan bin Ramid dan Bahrudin bin ..., dengan mas kawin berupa Uang Sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai;
 3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kp. Cikuray Rt.04 Rw. 01 Desa Rancasanggal, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sampai dengan sekarang;
 4. Bahwa para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 0 orang anak bernama :
 5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di kantor urusan agama kecamatan setempat;
 8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ini untuk pembuatan buku nikah, keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 6, Penetapan No. 341/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Masnun bin Ramid**) dengan Pemohon II (**Karmah binti Karim**) yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinangka, pada tanggal 20 Juni 1985;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan bahwa status Pemohon I adalah duda cerai dan status Pemohon II adalah janda cerai ketika keduanya menikah;

Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II menyatakan bahwa keduanya tidak memiliki akte cerai karena keduanya bercerai tidak melalui Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk pembuatan buku nikah, keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (d) dan butir (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 3 dari 6, Penetapan No. 341/Pdt.P/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan pengakuan para Pemohon bahwa ketika mereka menikah dahulu Pemmohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai namun keduanya tidak memiliki akte cerai sehingga karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat untuk dapat disahkan karenan tidak jelas statusnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345. 000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 oleh Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Acep Saefulloh, SH. MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

ttd

Dra. Nurnaningsih, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Acep Saefulloh, SH. MH.

Hal. 4 dari 6, Penetapan No. 341/Pdt.P/2024/PA.Srg



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 345.000,00

Terbilang (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Salinan yang sesuai dengan aslinya
Panitera

Hal. 5 dari 6, Penetapan No. 341/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Serang

Mulyadi, S.Ag.

Hal. 6 dari 6, Penetapan No. 341/Pdt.P/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)